



PUTUSAN

Nomor 1069/Pdt.G/2013/P. 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEJUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D2, tempat Kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun Agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak penggugat serta para saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat di dalam surat gugatannya bertanggal 22 Agustus 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register Nomor 1069/Pdt.G/2013/PA. Bpp, tanggal 22 Agustus 2013, telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

1. Tergugat pernah melangsungkan akad nikah secara sirri pada tanggal 20 Desember 2002, dihadapan seorang penghulu bernama PENGHULU di



Kabupaten Endre kang dengan Wali Nikah adalah bapak kandung sendiri. Dan dalam pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi masing – masing bernama:

- a. SAKSI NIKAH I, Agama Islam, umur 39 tahun.
- b. SAKSI NIKAH II , Agama Islam, umur 45 tahun, dengan maskawin berupa Cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut penggugat berstatus perawan dalam usia 14 tahun tergugat berstatus perjaka dalam usia 20 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Utara Sul–Sel dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I lahir Di Beringin Jaya 04 September 2003;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan penggugat dan tergugat dan selama itu pula penggugat dan tergugat tetap beragama Islam;
5. Bahwa karenanya penggugat dan tergugat sangat membutuhkan Penetapan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Balikpapan, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus gugatan perceraian;
6. Bahwa lebih kurang sejak tanggal 15 Februari 2009 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, karena sejak saat itu tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan anaknya tanpa ada khabar berita. Dan sejak kepergian tergugat tersebut, penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan tergugat;
7. Bahwa sejak pergi meninggalkan penggugat tersebut, tergugat tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istri dan anaknya, yakni memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya. Dan sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah pula memperhatikan dan atau menghiraukan penggugat sebagai istrinya yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebelum pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak ada meninggalkan harta yang berharga yang dapat dijadikan jaminan hidup bagi penggugat dan anak;
9. Bahwa dengan kepergian tergugat tersebut, penggugat sudah berusaha maksimal mencari tergugat dengan menanyakan keberadaan tergugat kepada keluarga dan teman-teman tergugat, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan tergugat sampai saat ini;
10. Bahwa dengan sikap dan perbuatan tergugat sebagaimana yang telah penggugat jelaskan diatas, penggugat merasa mudharat dan menderita lahir batin dan penggugat merasa sangat keberatan dan tidak ridha dengan sikap serta perbuatan tergugat tersebut;

Bersadarkan alasan / dalil – dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan amar yang berbunyi :

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan penggugat ;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Enrekang pada tanggal 20 Desember 2002, adalah sah;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat hadir sedangkan tergugat tidak hadir di persidangan, majelis telah berusaha menasihati penggugat agar hidup rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil, karena penggugat berkeras ingin bercerai dengan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, penggugat menyatakan tetap mempertahankannya;

Bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Balikpapan melalui Pengumuman di Mess Media di Balikpapan yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama Balikpapan, namun tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tentang alasan perceraian, penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Kabupaten Luwu Utara, Nomor 100/135/DBJ.KB/VII/2013, tanggal 13 Agustus 2013, bertanda P;

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, penggugat mengajukan bukti saksi dua orang bernama:

1. SAKSI I, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;
2. SAKSI II, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;

Kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk pertimbangan putusan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, karena tidak hadir di muka persidangan pada saat pemeriksaan saksi;

Bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan hanya mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini, dinyatakan termuat pula dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha menasihati penggugat agar hidup rukun lagi dengan tergugat sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena penggugat tetap berkeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, sedangkan salinan surat gugatan penggugat telah ditempelkan di papan pengumuman untuk ditanggapi oleh tergugat, namun karena ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap telah mengetahui adanya gugatan penggugat, namun tidak menggunakan haknya untuk menjawab dan menanggapi gugatan tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg, perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi yang telah diajukan oleh penggugat, ternyata keterangan saksi tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat serta tidak ditanggapi oleh tergugat karena tergugat tidak hadir di muka persidangan, maka dengan demikian keterangan dua orang saksi telah meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa hingga saat ini tergugat telah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, (bukti P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terungkap fakta bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal, karena tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberi nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian tergugat dinyatakan telah terbukti melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan melanggar taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah, oleh karena itu alasan cerai yang dikemukakan oleh penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya alasan cerai penggugat, penggugat telah pula membayar uang iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah dibayarnya uang iwadl tersebut, maka gugatan cerai penggugat terhadap tergugat dengan berdasarkan pelanggaran taklik talak harus dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Menetapkan sah pernikahan penggugat (PENGGUGAT) dengan tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan di Kabupaten Enrekang, tanggal 20 Desember 2002;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT, dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Selasa, tanggal 31 Desember 2013 M bertepatan tanggal 28 Safar 1435 H, oleh kami Drs. H. Anwar Hamidy, Ketua Majelis serta Dra. Juraidah dan Drs. Elya, masing-masing Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nur Aliah, S. H., S. Ag., M. H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

Drs. H. Anwar Hamidy

ttd

Dra. Juraidah

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Elya

ttd

Hj. Nur Aliah, S. H., S. Ag., M. H.

Perincian biaya perkara:

• Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
• Biaya proses	Rp. 75.000,00
• Biaya Panggilan	Rp. 180.000,00
• Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
• <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 296.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)